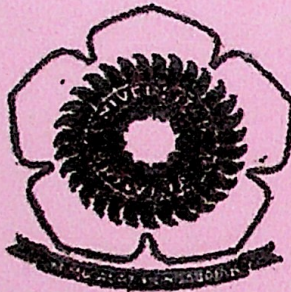


**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (AAD) DI
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Disusun oleh

RAHMAD BUDI HARYANTO

(07071001093)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

MEI 2012

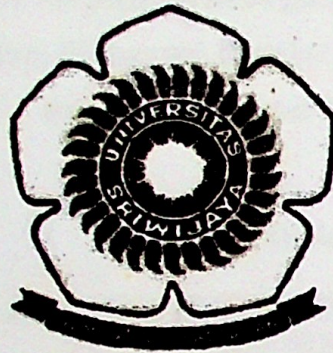


**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (AAD) DI
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR**

TAHUN 2010

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Disusun oleh

RAHMAD BUDI HARYANTO

(07071001093)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

MEI 2012

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mencapai Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan Oleh :

**RAHMAD BUDI HARYANTO
(07071001093)**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada Mei 2012**

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si

NIP. 19631106 199003 1 001

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si

NIP. 19770512 200312 1 003

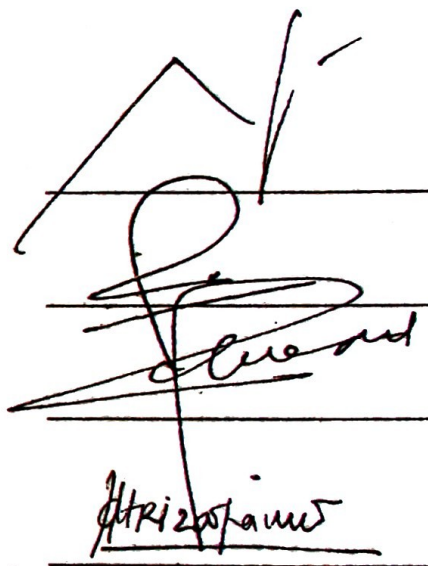
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal, 9 Mei 2012
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Tim Penguji

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
Ketua
2. Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
Anggota
3. Drs. Joko Siswanto, M.Si
Anggota
4. Dra. Katriza Imania, M.Si
Anggota



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is the most prominent, followed by a second signature, and a third signature at the bottom that appears to read 'Hrizafianus'.

Inderalaya, - Mei 2012
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

Halaman Persembahan

Motto:

- ◆ ***Cobalah tidak untuk menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang yang bernilai (Albert Einstein)***
- ◆ ***"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Al-Baqarah: 153)***

Atas rahmat Allah SWT,

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ◆ ***Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Husni Afrianto) & Ibu (Budi Harti)***
- ◆ ***Adik-adik ku tersayang, Syafiq & Rahmadhani***
- ◆ ***Masa depan cerah yang menantiku***
- ◆ ***Amanaterku***

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan serta karunia yang berlimpah kepada hambanya. Salawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulis sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayah Husni Afrianto dan Ibu Budi Harti yang tercinta serta adikku tersayang Syafira Rahmadhani atas doa dan dukungannya
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M. Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS, selaku Pembantu Dekan I FISIP Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah membimbing penulis dan memberikan saran serta masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah membimbing penulis dan memberikan saran serta masukan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. M. Husni Thanrin, M.Si, selaku pembimbing akademis yang telah membantu dan membimbing selama menjalani perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis yang sangat berharga bagi penulis untuk menuju cita-cita.
9. Bapak Hadian Burhani selaku Kepala Desa Tanjung Dayang Selatan
10. Bapak Asmawi selaku Kepala Desa Beti.
11. Bapak Yusuf selaku Bagian III dari Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Teman – teman seperjuangan jurusan Administrasi Negara angkatan 2007.
13. Si merah Raja Jalanan.
14. Dan Pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis sehingga dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Walaikumsalam. Wr. Wb

Palembang, Juni 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teori.....	10
1.5.1 Efektivitas.....	10
1.5.2 Pengelolaan.....	15
1.5.3 Alokasi Dana.....	16
1.5.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.....	19
1.6 Metodologi Penelitian.....	30
1.6.1 Definisi Konsep.....	30

1.6.2 Fokus Penelitian.....	31
1.6.3 Unit Analisis.....	34
1.6.4 Informan Penelitian.....	34
1.6.5 Data Sumber Data.....	34
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.6.7 Teknik Analisis Data.....	36
1.7 Sistematika Penulisan.....	37
BAB II GAMBARAN UMUM.....	38
2.1 Kecamatan Indralaya Selatan	38
2.1.1 Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi	
Kecamatan Indralaya Selatan	38
2.1.2 Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk	
di Kecamatan Indralaya Selatan	39
2.1.3 Jenis Mata Pencaharian Penduduk di	
Kecamatan Indralaya Selatan	41
2.2 Desa Tanjung Dayang Selatan	42
2.2.1 Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi	
Desa Tanjung Dayang Selatan	42
2.2.2 Keadaan dan Topografi	43
2.2.3 Jumlah dan Potensi Penduduk	43
2.2.4 Mata Pencaharian Penduduk	44
2.2.5 Pendidikan	44
2.2.6 Pemerintahan Desa	45
2.3 Desa Beti	51
2.3.1 Lokasi dan Batas Wilayah Administrasi	
Desa Beti	50
2.3.2 Keadaan dan Topografi	51

2.3.3 Jumlah dan Potensi Penduduk	51
2.2.4 Mata Pencaharian Penduduk	51
2.2.5 Pendidikan	52
2.2.6 Pemerintahan Desa	53
BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	58
3.1 Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	
di Kecamatan Indralaya Selatan	58
3.1.1 Analisis Input Perencanaan	60
a. Sumber Daya Manusia	60
b. Analisis Anggaran/Dana	61
c. Analisis Aspirasi Masyarakat	62
3.1.2 Analisis Throughput Perencanaan	63
a. Analisis Penyusunan ADD	64
3.1.3 Analisis Output Perencanaan	65
a. Analisis Penetapan APBDes	65
3.2 Analisis Pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD)	
di Kecamatan Indralaya Selatan	68
3.2.1 Analisis Input Pengorganisasian	68
a. Sumber Daya Manusia	68
b. Analisis Informasi	69
3.2.2 Analisis Throughput Pengorganisasian	70
a. Analisis Pendidikan dan Pelatihan	70
3.2.3 Analisis Output Pengorganisasian	71
a. Analisis Tim Pelaksana	72
3.3 Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)	
di Kecamatan Indralaya Selatan	74
3.3.1 Analisis Input Pelaksanaan	74

a. Analisis Sumber Daya Manusia	74
b. Analisis Informasi	75
3.3.2 Analisis Throughput Pelaksanaan	77
a. Analisis Pelaksanaan ADD	77
3.3.3 Analisis Output Pelaksanaan	83
a Analisis Hasil Laporan Kegiatan	83
3.4 Analisis Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan	86
3.4.1 Analisis Input Pengawasan	86
a. Sumber Daya Manusia	86
3.4.2 Analisis Throughput Pengawasan	87
a. Analisis Pengawasan Tim Pembina Kecamatan.....	87
b. Analisis Pengawasan Tim Pembina Kabupaten.....	89
3.4.3 Analisis Output Pengawasan	90
a Analisis Evaluasi Kegiatan ADD.....	90
3.5 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan	93
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) Tiap Desa Pada Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.....	7
Tabel 1.2 Fokus Penelitian.....	32
Tabel 2.1 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Perdesa di Indralaya Selatan Tahun 2010	40
Tabel 2.2 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Indralaya Selatan Tahun 2010	41
Tabel 2.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Dayang Selatan	44
Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjung Dayang Selatan	45
Tabel 2.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Beti	52
Tabel 2.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Beti	53
Tabel 3.1 Tim Pelaksana Desa Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tanjung Dayang Selatan	72
Tabel 3.2 Tim Pelaksana Desa Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Beti	73
Tabel 3.3 Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tanjung Dayang Selatan Untuk Belanja Pegawai/Honorarium.....	78
Tabel 3.4 Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Tanjung Dayang Selatan Untuk Belanja Pembangunan.....	79
Tabel 3.5 Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Beti Untuk Belanja Pegawai/Honorarium	81
Tabel 3.6 Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Beti Untuk Belanja Pembangunan	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pola Dasar Sebuah Model Efektivitas.....	14
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Dayang Selatan...	47
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beti	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Hasil Wawancara

Lampiran 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa

Lampiran 6 : Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana
Perimbangan Keuangan Desa Di Kabupaten Ogan Ilir

Lampiran 7 : Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Fokus penelitian adalah pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dimana melalui tahapan input, throughput, dan output. Unit analisis penelitian ini adalah Desa Tanjung Dayang Selatan, dan Desa Beti. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Dayang Selatan, dan Tim Pembina Kecamatan Indralaya Selatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode Wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, Data yang terkumpul berupa data kualitatif yang akan dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif. Berdasarkan analisis dan interpretasi data di dapatkan hasil bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Pada tahap perencanaan, input dapat digolongkan efektif, sedangkan untuk throughput dapat digolongkan efektif, dan output dapat digolongkan efektif. Tahap pengorganisasian, untuk input dapat digolongkan efektif, sedangkan untuk throughput dapat digolongkan belum berjalan efektif, dan output dapat digolongkan efektif. Tahap pelaksanaan input dapat digolongkan efektif, sedangkan throughput dapat digolongkan belum efektif, dan output dapat digolongkan belum efektif. Dan tahap pengawasan input dapat digolongkan efektif, sedangkan throughput dapat digolongkan efektif, dan output dapat digolongkan belum efektif. Adapun kendala yang dihadapi sistem pembinaan yang belum berjalan efektif, rendahnya tingkat kemampuan aparat pemerintah desa, dan terbatasnya dana yang didapat. Saran yang dapat penulis berikan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Thun 2010, yaitu adanya pelatihan bagi perangkat desa selaku tim pelaksana desa mengenai manajemen dan administrasi pengelolaan ADD, adanya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja, dan adanya suatu pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Input, Throughput, dan Output

ABSTRACT

This study aims to determine a clear picture of the management of the Alokasi Dana Desa (ADD) on Sub Indralaya Selatan Ogan Ilir Regency in year 2010. It is also to know what the constraints faced in the management of the Village Fund Allocation (ADD) on Sub Indralaya Selatan Ogan Ilir Regency Year 2010. The approach of this research uses a qualitative approach, this type of research is a descriptive study. The focus of research is the management which includes planning, organizing, implementing, and monitoring, which through the stages of input, throughput, and output. The unit of analysis of this research is Tanjung Dayang Selatan village, and Beti village. Informants in this study is Tanjung Dayang Selatan chief, Beti chief, and coach Indralaya Selatan District team. Techniques for collecting data in this research using interview methods, and documentation. Technique for analyzing data used in this research is descriptive analysis technique, data collected in the form of qualitative data will be analyzed and interpreted descriptively. Based on the analysis and interpretation of the data in getting the results that the management of the Village Fund Allocation (ADD) on Sub Indralaya Selatan Ogan Ilir Regency in 2010. In the planning phase, the input can be classified as effective, use for the effective throughput can be classified, and the output can be classified as effective. Organizing phase, the input can be classified as effective, while for the throughput can be classified as effective, and the output can be classified as effective. Implementation phase input can be classified as effective, while the throughput can be classified as not effective, and the output can be classified as not effective. And controlling stage input can be classified effectively, while the throughput can be classified as effective, and the output can be classified as not effective. The constraints faced by coaching system that has not been effective, are low-level government officials the ability of the village, and the limited available funds. For suggestions the author provided in the management of the Village Fund Allocation (ADD) on Sub Indralaya Selatan Ogan Ilir Regency in 2010, namely the existence of training for the village as the village implementation team regarding the management and administration management of ADD, the existence of continuous monitoring and evaluation to improve performance, and the presence of a targeted and sustainable development.

Keywords: Alokasi Dana Desa (ADD), Management, Input, Throughput, and Output.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi tonggak pelaksanaan otonomi daerah dengan paradigma baru yang di dalamnya terkandung semangat penguatan desentralisasi yang membuka peluang luas bagi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara lebih baik, mandiri, dan berkoordinasi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri pemerintah suatu daerah dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004:8).

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat tercapai apabila daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Secara umum pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensial sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 200

ayat (1) disebutkan bahwa “dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa”. Sehingga dengan begitu pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi, selama ini pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat.

Pemerataan pembangunan di pedesaan harus diselaraskan dengan berbagai aspek yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut. Aspek-aspek tersebut meliputi sumber daya alam, sumber penghasilan sampai dengan kebutuhan perangkat desa. Peliknya masalah pemerataan pembangunan di pedesaan merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil dari lokakarya Penentuan Program Prioritas Pemberdayaan dan Pembaharuan Desa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) di Jakarta, 28 Juli 2004, disana ditekankan pentingnya dukungan pembiayaan dari Kabupaten ke Desa. Oleh sebab itu, maka Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menawarkan untuk mengeluarkan suatu regulasi tingkat nasional yang dapat dijadikan pedoman bagi Kabupaten ke Desa. Untuk mengatasi hal diatas, maka pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa pada tiap-tiap desa sesuai dengan aspek yang dimiliki.

Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, disebutkan bahwa desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kewenangan yang

diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari sumber seperti dari pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat.

Salah satu sumber pembiayaan desa yang berasal dari pemerintah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), yang dijelaskan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 dalam pasal 68C disebutkan” bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”. Dimana dalam pasal 68C tersebut yang dimaksudkan dengan” bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai, serta dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang mengatur prosentase perimbangan keuangan kabupaten ke desa. Alokasi Dana Desa merupakan hak yang didapatkan desa untuk digunakan dalam

pembiayaan operasional pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, efisiensi dan merata sesuai dengan aspek-aspek penentu yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyadari bahwa desa adalah potensi pembangunan yang besar bagi daerah dan efektivitas otonomi desa merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien dari pada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Investasi yang lebih efisien ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dalam jangka panjang. Pemberian kewenangan yang disertai dengan biaya perimbangan tersebut diwujudkan dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya.

Bantuan Langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Ogan Ilir No 38 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pasal 3 disebutkan sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Sumber pendapatan desa

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil sari swadaya masyarakat, dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten minimal 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa sebesar 10% yang pembagiannya untuk setiap desa sama;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2. Persentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja pegawai.

3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Perintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
4. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Pengelolaan Keuangan Alokasi Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa dengan penerapan seperti yang telah ditentukan diharapkan dengan begitu, maka desa dapat melakukan pengelolaan pembangunan desa dengan baik. Sehingga dapat memberikan manfaat dan hasil

kepada desa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini. Dalam penelitian ini dipilih Kecamatan Indralaya Selatan sebagai lokasi penelitian Alokasi Dana Desa (ADD), karena dekat dari Ibukota Kabupaten Ogan Ilir. Jarak antara Kecamatan Indralaya Selatan dengan Ibukota Kabupaten kurang lebih 5Km. Ini dimaksudkan untuk lebih menfokuskan penelitian dan validitas data.

Berikut ini data penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2010 untuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir dalam bentuk tabel :

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa (ADD) Tiap Desa Pada Kecamatan Indralaya Selatan
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010

No	Nama Desa	Tahun 2010	Bantuan Swadaya	Jumlah Penduduk
1	Arisan Gading	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1476
2	Beti	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	832
3	Mandi Angin	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	788
4	Meranjat I	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	2416
5	Meranjat II	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1763
6	Meranjat III	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1315
7	Meranjat Ilir	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1468
8	Suka Raja Baru	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1882
9	Suka Raja Lama	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1510
10	Tanjung Dayang Selatan	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	2022
11	Tanjung Dayang Utara	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1318
12	Tanjung Lubuk	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1696
13	Tebing Gerinting Selatan	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1407
14	Tebing Gerinting Utara	Rp. 30.000.000	Rp. 1.000.000	1822
	Jumlah Keseluruhan	Rp. 420.000.000	Rp. 14.000.000	21.715

Sumber: Kantor Kecamatan Indralaya Selatan

Pada tabel dijelaskan pembagian ADD pada Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 14 Desa, dimana total Penerimaan ADD pada Tahun 2010 sebesar Rp. 420.0.000.000 dan Dana Swadaya Rp. 14.000.000. Pada pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa menerima sama tanpa ada pengecualian. Hal ini telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Ilir yang meratakan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD). Walaupun dana yang dikucurkan kecil tapi ini sangat bermanfaat terhadap pembangunan Desa, dan pengalokasiannya harus sangat menjunjung tinggi azas keterbukaan atau transparansi.

Pada pengelolaannya di Kecamatan Indralaya Selatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini banyak menemui kendala, hal tersebut diungkapkan oleh tim fasilitas tingkat Kecamatan Indralaya Selatan yang mengatakan bahwa:

“dalam prakteknya di kecamatan Indralaya Selatan ini Alokasi Dana Desa masih mengalami beberapa kendala, diantaranya belum terlihat jelas hasil pembangunan untuk masyarakat, tiap tahunnya. Selain itu juga banyak desa yang tidak patuh aturan, dimana sering terlambatnya laporan hasil kegiatan ADD ini ke tingkat kecamatan, padahal laporan itu diperlukan untuk pencairan dana ADD tahap selanjutnya.”

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa latar belakang yang telah terjadi maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Dalam penelitian ini akan diambil 2 desa sebagai sampel penelitian, yaitu Desa Tanjung Dayang Selatan dan Desa Beti.

Desa-desa ini dipilih secara acak karena semua desa yang ada di Kecamatan Indralaya Selatan memiliki karakteristik yang sama.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya gambaran latar belakang masalah yang disebutkan diatas , maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam bidang Keuangan Negara.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Indralaya Selatan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Menurut Chester I. Bernard (dalam suwandi, 2005: 14) menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah berikut :

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak

efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut tidak efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu yang efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Menurut Peter Drucker (dalam Handoko, 2003 : 7) “efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang tepat (*doing the things*), sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*) atau efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat”.

Menurut Peter Drucker (dalam suwandi, 2005:16), kemungkinan yang terjadi dalam mencapai tujuan, yaitu :

- a. Efektif dan efisien, ini yang paling baik.
- b. Efektif tetapi tidak efisien, ini kurang menguntungkan.
- c. Efisien tetapi tidak efektif, tujuan tidak tercapai
- d. Tidak efektif dan tidak efisien, kemungkinan yang paling buruk dan sangat merugikan.

Jones (dalam munir, dkk, 2004:44) berpendapat bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (*objectives*), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan keluaran (*output*). Jones juga mengatakan bahwa yang dilakukan suatu organisasi dalam pencapaian hasil (efektivitas) terdiri dari tiga tahap:

1. *input* (masukan), yang meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.
2. *conversion* (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen, dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.
3. *output* (keluaran), yaitu pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Gibson (Waluyo, 2007:84) menyebutkan bahwa terdapat 2 pendekatan dalam mengidentifikasi efektivitas yaitu:

a. Pendekatan menurut tujuan

Adalah untuk merumuskan dan mengukur efektivitas melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan usaha kerjasama.

b. Pendekatan teori sistem Menekankan pada pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian efektivitas.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas dinilai berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum, sehingga sesuatu dapat dikatakan efektif.

Menurut Steers (dalam Rukmana, 2006:15), bahwa pengertian efektivitas organisasi mempunyai arti berbeda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Efektivitas itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika

dilihat dari sudut keberhasilan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan tujuan operasional. Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau target serta sasaran dari organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan memperhatikan segala sumber daya yang dimiliki. Menurut Steers, pengukuran efektivitas kegiatan pemerintah dapat dilihat dari:

1. Paham mengenai tujuan organisasi

Ukuran pencapaian tujuan dikatakan berhasil jika dapat memaksimalkan kemampuan yang ada, seperti uang, teknologi, sumberdaya manusia, dan sebagainya.

2. Perspektif sistematika

Organisasi tidak hanya mengalami modifikasi setiap waktunya ditinjau dari sudut struktur, teknologi, dan lingkungan tetapi tujuan yang berubah-ubah karena bermacam-macam alasan.

3. Tekanan pada perilaku manusia dalam susunan organisasinya

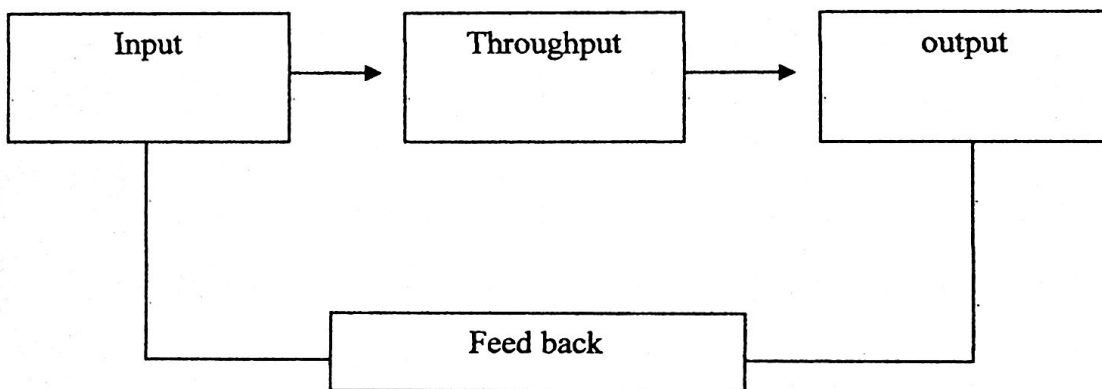
Perilaku manusia merupakan unsur penting untuk mencapai tujuan, baik perilaku individu maupun kelompok yang menjadi perilaku penentu keberhasilan atau justru sebagai penghalang tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan teori diatas melihat pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) dengan melihat keefektivan yaitu memakai pendekatan sistem, yang lebih

memfokuskan pada proses. Perspektif sistem ini digunakan untuk mengukur efektif tidaknya pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) yaitu dengan melihat berbagai komponen-komponen didalam sistem yang terdiri dari komponen dasar yaitu input, throughput (proses) dan output dalam pencapaian tujuan. Perspektif sistem terbuka dapat diperjelas dengan gambar berikut:

Gambar 1.1

Pola Dasar Sebuah Model Efektivitas



Sumber : Richard M, Sreers, "Efektivitas Organisasi". 1986

Unsur-unsur ini terjadi dalam sebuah organisasi maupun sebuah lembaga, dimana dari unsur ini akan dilihat efektivitasnya. Unsur-unsur tersebut meliputi (dalam Sutarto, 2000:335).

- a. *Input*, yaitu unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah, misalnya uang, orang, energi, dan benda.
- b. *Throughput* (proses pengolahan) yaitu kegiatan mengubah Input (orang dan benda atau mesin) menjadi output
- c. *Output*, yaitu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan, berupa produksi fisik (barang) dan jasa (pelayanan)

Menurut Campbell (1980:45) ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi menghasilkan pengenalan 19 (sembilan belas) variabel yang digunakan secara luas ukurannya meliputi: efektivitas keseluruhan, kualitas, produktivitas, kesiagaan, laba/penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, perputaran/keluar masuknya pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi, kepaduan konflik-konflik, keluwesan-adaptasi, dan penilaian pihak luar.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas yang akan dipakai adalah :

1. Efektivitas Keseluruhan, yaitu sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.
2. Produktivitas, yaitu kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi.

1.5.2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya (Harsoyo, 1977:121). Menurut Lembaga Administrasi Negara (Tjokroamidjoyo,dkk 1989:30) pengelolaan adalah : Konsep manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan yang meliputi fungsi organik dari manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi manajemen tersebut merupakan fungsi pengelolaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Markharita (dalam Simbolon, 2004 : 23) menyatakan bahwa manajemen adalah pemanfaatan sumber-sumber

yang tersedia atau yang berpotensi didalam pencapaian tujuan. Faktor manusia dan tindakannya adalah yang paling menentukan berfungsi atau tidaknya sumber-sumber tersebut dan sekaligus akan menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya diantara semua yang dikoordinasikan itu. Bidang manajemen ini menitikberatkan pada urusan manusia-manusia yang memberikan tenaga untuk bekerja, disamping pengurusan sumber-sumber yang dipakai dalam bekerja dengan menggunakan teknik tersebut.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan ada empat tahapan bagian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.

1.5.3. Alokasi Dana Desa

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP. 72 Tahun 2005 memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan Keuangan Desa dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP. 72/2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 11, PP No. 72 Tahun 2005). Jadi berdasarkan Pasal dan PP yang telah disebutkan, ADD yang diberikan merupakan hak mutlak bagi setiap desa yang ada pada Kabupaten/Kota yang ada.

Sumber Alokasi Dana Desa berasal dari:

1. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
2. Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah.
3. Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu.

Untuk besaran persentase sumber Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksudkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dialokasikan 10% setelah dikurangi Belanja Pegawai.
2. Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah dialokasikan sebesar 10%.
3. Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tertentu dialokasikan sebesar 10%.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antara desa yang satu dengan yang lainnya.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik desa (BUMDes).

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) per desa diatur dengan cara sebagai berikut :

1. 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional dan kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa.
2. 70% (tujuh puluh persen) untuk Publik dan Pemberdayaan Masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes.
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - e. Teknologi tepat guna.
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
 - g. Pengembangan sosial budaya.

Berdasarkan keputusan tersebut maka pemerintah Kabupaten Ogan Ilir membagikan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut ke beberapa Kecamatan, termasuk Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 13 Desa.

1.5.4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010

Kriteria untuk mencapai tujuan adalah efektif dan efisiensi. Efektivitas paling tidak dapat dimengerti jika dilihat dari sudut keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan dan mendapatkan sumber daya dalam usaha mengejar tujuan operasi dan operasionalnya (Steers, 1996). Melihat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir efektivitas yaitu memakai perspektif sistem yang dikemukakan oleh Steers, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga dilihat dari pendekatan penganggaran di dalam keuangan negara. Pendekatan penganggaran terdiri dari 3 jenis meliputi pendekatan Penganggaran Terpadu, pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Pendekatan penganggaran yang akan digunakan yaitu pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penerapan ini akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yaitu berusaha untuk menghubungkan

antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah:

1. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (*ouput*) dan hasil (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan,
2. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Renstra dan/atau tugas-fungsi K/L.

Kedua teori diatas yaitu perspektif sistem dan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) pada dasarnya sama-sama menekankan pada input dan output yang pada akhirnya melihat *outcomes* (hasil). *Outcomes* yang didapatkan apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi kegiatan. Tentu saja *input* akan melewati suatu proses yang akan merubah menjadi *output*. Komponen sistem yang terdiri dari input, proses, dan output tersebut akan dilihat di tiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan kabupaten Ogan Ilir.

Pengelolaan merupakan kata lain dari manajemen, hal ini didukung oleh pernyataan Moekijat (1989: 316) yang di dalam kamus manajemen menyatakan bahwa pada hakekatnya merupakan kata lain dari management. Management adalah manajerial, pengurusan, kepemimpinan, ketatalaksanaan, pembinaan, ketatapengurusan, pengelolaan dan sebagainya. Hal yang sama diungkapkan oleh Westra dalam silalahi (2002:135) kata management ini diterjemahkan dalam

berbagai istilah seperti: kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, penguasaan, dsb.

Lembaga Administarsi Negara (LAN, 1989:30) mengartikan pengelolaan sebagai konsep manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan meliputi fungsi organik manajemen meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dimana fungsi pengelolaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. George R. Terry dalam bukunya "Principles of Management" menyampaikan pendapatnya "manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Fungsi pengelolaan tersebut sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan Mahmudi (2007: 14) bahwa "siklus keuangan daerah pada dasarnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau implementasi, dan tahap pelaporan dan evaluasi kerja". Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan pengertian di atas tahap pengelolaan yang ingin dilihat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

a. Perencanaan

Sondang P. Siagian perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah di perhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan di kerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Menurut Dalton, (dalam Soewarno 1982:21) perencanaan berarti memutuskan tujuan berdasarkan ramalan apa yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Berarti perencanaan dapat dikatakan sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan sasaran tujuan, strategi, program, dan prosedur pencapaian. Simbolon (2004:38) mendefenisikan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal-hal yang akan di kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan. Menurut Bintoro dalam bukunya Perencanaan Pembangunan (1996:12) perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan dimasa depan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Manullang (2005:41) mengatakan suatu rencana harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penjelasan dari perincian kegiatan-kegiatan yang dibutuhkannya, faktorfaktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan.

- b. Penjelasan mengapa kegiatan-kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan yang ditentukan itu harus tercapai.
- c. Penjelasan tentang lokasi fisik setiap kegiatan yang harus dikerjakan sehingga tersedia segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu.
- d. Penjelasan mengenai waktu dimulainya pekerjaan dan diselesaikannya pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian pekerjaan maupun untuk seluruh pekerja. Di sini harus ditetapkan standar waktu untuk mengerjakan, baik bagian-bagian pekerjaan maupun untuk seluruh pekerjaan.
- e. Penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan pekerjaannya, baik mengenai kuantitas maupun mengenai kualitas, yaitu kualifikasi-kualifikasi pegawai, seperti keahlian, pengalaman, dan sebagainya.
- f. Penjelasan tentang teknik mengerjakan pekerjaan.

Manullang juga menyatakan sifat suatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang
- b) Fleksibel
- c) Mempunyai stabilitas
- d) Ada dalam perimbangan
- e) Meliputi semua tindakan yang diperlukan

Karena itulah perencanaan harus bersifat eleksibilitas dimana rencana-rencana di perlukan supaya dapat memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud.

Menurut Siswanto (2005:55) “Efektivitas perencanaan berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.” Efektivitas perencanaan dilihat dengan menggunakan pendekatan sistem dengan melihat bagaimana peran *input*, *throughput*, serta *outputnya*.

Input dalam penentuan perencanaan ini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), besarnya dana yang didapat atau perkiraan dana yang akan didapat, dan aspirasi masyarakat yang semuanya itu dilihat dari petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dimasukkan ke dalam APBDes setiap tahun anggarannya. Untuk *throughput* (proses) perencanaan Alokasi Dana Desa yang akan dilihat adalah penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian *output* yang dihasilkan di dalam perencanaan Alokasi Dana Desa berupa Penetapan RAPBDes.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut Stoner (1996:88) yaitu merupakan kegiatan mengkoordinir sumber daya manusia dan perlengkapannya termasuk menyusun struktur dan pembagian kerja untuk melaksanakan program. Menurut Hasibuan (2008:23) pengorganisasian dapat diartikan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut Siswanto (2005:75) pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Di dalam pengorganisasian diperlukan tahapan seperti yang dinyatakan Siswanto (2005:75) yaitu:

- a. Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai,
- b. Deskripsi pekerjaan yang harus dioperasikan dalam aktivitas tertentu,
- c. Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan praktis,
- d. Memberikan rumusan yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau kesatuan aktivitas yang hendak dioperasikan,
- e. Penunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya,
- f. Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk.

Dalam melihat bagaimana pengorganisasian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) *input* dalam pengorganisasian ini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan informasi yang mempengaruhi pengorganisasian. Sedangkan *Througput* (proses) pengorganisasian Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu: Pendidikan dan pelatihan tim pelaksana desa yang akan menjalankan pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini. Sedangkan *output* yang dihasilkan pada tahap pengorganisasian yaitu pembentukan tim pelaksana desa yang akan menjalankan proses kegiatan tersebut .

c. Pelaksanaan

Secara umum setelah adanya suatu perencanaan dan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan, selanjutnya dilakukan pelaksanaan untuk mencapai tujuan selanjutnya dilakukan implementasi atau pengawasan sebagian paling akhir dalam pengelolaan. Pelaksanaan diartikan oleh Farland (dalam Simbolon, 2004:61) sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah di tentukan.

Dalam hakikatnya pelaksanaan memiliki kaitan kuat pada perencanaan, dimana kegiatan perencanaan harus berpatokan pada perencanaan yang telah di tetapkan. Wibawa (1994:23) Mengutip pendapat Meter dan Horn mendefenisikan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut "Implementasi (Pelaksanaan) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam kebijakan". Pelaksanaan sering disebut pula sebagai implementasi. Grindle (dalam Agustino, 2008:139) mengatakan pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008:139) dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses

dan pencapaian tujuan akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan tujuan yang ingin diraih.

Efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan sistem yang melihat bagaimana peran *input*, *throughput*, serta *outputnya*. *Input* dalam penentuan pelaksanaan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), dan fungsional. Sedangkan *throughput (proses)* pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir adalah pelaksanaan program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan *output* yang dihasilkan pada tahap pelaksanaan ini adalah hasil laporan kegiatan.

d. Pengawasan

Menurut Siagian (2006:112), Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses tindakan mengamati dan menilai kegiatan di dalam tubuh organisasi baik besar maupun kecil sekalipun dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Menurut Manullang (1996:136) dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah melaksanakan dalam merealisasikan tujuan harus dilalui beberapa tahap pelaksanaan. Proses pengawasan berobjek apapun terdiri dari tahap berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Tugas dapat dilaksanakan jika mempunyai alat pengukur. Pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada bagian-bagian rencana. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Mengadakan penilaian

Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan dengan alat ukur yang sudah ditentukan. Dari sini dapat diketahui penyimpangan yang dilakukan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Bila pada tahap berikutnya ditemui penyimpangan, maka dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan hasil kerja nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

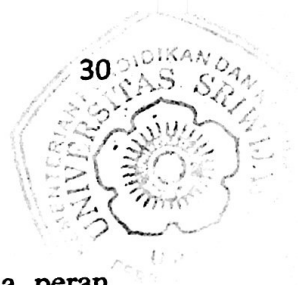
Dari sumber diatas dapat diartikan betapa pentingnya pengawasan dimana pengawasan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam menemukan kesalahan, penyelewengan dan ketidaktepatan penyelenggaraan tugas yang di bebaskan serta untuk untuk menemukan kesalahan seseorang. Akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi dalam melaksanakan tugas. Menurut Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengatakan pengawasan yang efektif dan efisien harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat : "*Fact Finding*" dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan faktor-faktor tentang bagaimana tugas-tugas tertentu ada faktor-faktor lain seperti faktor struktur organisasi,

prosedur kerja, faktor biaya, dan faktor psikologis seperti rasa hormat, dihargai, serta kemajuan dalam karier.

2. Pengawasan harus bersifat preventif, yang berarti pengawasan itu dilanjutkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk mencapai efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Pengawasan sebagai alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jadi jangan sampai pengawasan malah menghambat usaha meningkatkan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Berdasarkan pernyataan diatas maka untuk melihat bagaimana pengawasan di dalam suatu pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya selatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu dengan mengetahui bagaimana efektivitas dari pengawasan tersebut. Efektivitas pengawasan dilihat dengan



menggunakan pendekatan sistem. Dengan demikian melihat bagaimana peran *input*, *Througput* serta *outputnya*.

Input dalam penentuan pengawasan ini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan *througput (proses)* pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan kabupaten Ogan Ilir adalah pengawasan oleh Tim Pembina Kecamatan dan pengawasan oleh Tim Pembina Kabupaten. Sedangkan *output* yang dihasilkan pada tahap pengawasan ini adalah evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

1.6. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2003:1), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena hanya menggambarkan dan memaparkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

1.6.1. Definisi Konsep

Menurut Masri Singarimbun (1995:33) definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstraksi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Sehubungan dengan judul penelitian yang telah dibuat, ada beberapa hal yang akan dijelaskan penulis antara lain:

- a. Efektivitas adalah suatu upaya pencapaian tujuan atau sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan memperhatikan segala sumber daya yang dimiliki.
- b. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota yang diberikan kepada desa.
- c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 suatu sistem fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

1.6.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan diteliti dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008-2010 adalah pengelolaannya, yaitu perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan hal itu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan	Perencanaan	<i>Input</i> (Masukan)	1. Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Anggaran / Dana 3. Aspirasi Masyarakat
		<i>Throughput</i> (Proses)	1. Penyusunan Alokasi Dana Desa (ADD)
		<i>Output</i> (Keluaran)	1. Penetapan APBDes
	Pengorganisasian	<i>Input</i> (Masukan)	1. Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Informasi
		<i>Throughput</i> (Proses)	1. Pendidikan dan Pelatihan
		<i>Output</i> (Keluaran)	1. Pembentukan Tim Pelaksana Desa
	Pelaksanaan	<i>Input</i>	1. Sumber Daya Manusia

		<p>(Masukan)</p> <p><i>Throughput</i> (Proses)</p> <p><i>Output</i> (Keluaran)</p>	<p>(SDM)</p> <p>2. Informasi</p> <p>1. Pelaksanaan Program Kegiatan Yang Bersumber Dari ADD</p> <p>2. Hasil Laporan Kegiatan</p>
	Pengawasan	<p><i>Input</i> (Masukan)</p> <p><i>Throughput</i> (Proses)</p> <p><i>Output</i> (Keluaran)</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>1. Pengawasan Oleh Tim Pembina Kecamatan</p> <p>2. Pengawasan Oleh Tim Pembina Kabupaten</p> <p>1. Evaluasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)</p>

1.6.3. Unit Analisis Data

Unit penelitian atau analisa menurut Singarimbun (1995:217) adalah unit yang akan diteliti atau dianalisa. Maka unit analisa dalam penelitian ini adalah Desa Tanjung Dayang Selatan dan Desa Beti yang terdapat di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

1.6.4. Informan Penelitian

Key Informan dalam penelitian berguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini key informan adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Camat dan Ketua BPMD yang ada di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

1.6.5. Data dan Sumber Data

Data adalah representatif dari hal-hal yang bersifat nyata yang dapat diartikan sebagai fakta, bukti, sesuatu cara secara pasti diketahui atau serangkaian informasi yang ada di sekitar kita (Teguh, 1999:118).

Berdasarkan bentuk data, data yang digunakan adalah:

a. Data Kualitatif, yaitu informasi yang digali dari hasil penelitian fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak atau sumber asli yang menjadi sumber penelitian dilapangan melalui wawancara dengan informan kunci dikantor Kepala Desa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang menjadi data penunjang bagi data primer melalui media perantara seperti buku-buku, catatan, dokumentasi, undang-undang, peraturan dan lain-lain yang bergubungan dengan penelitian ini.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Suatu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dengan informan kunci yang terlibat langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan mempelajari bahan bacaan atau literatur berupa laporan-laporan ataupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun kegunaan studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dibutuhkan.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan Singarimbun (1995:263). Penelitian ini menggunakan teknik analisa secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kecamatan Indralaya Selatan. Data yang terkumpul berupa data kualitatif yang akan dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Reduksi data : diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- b. Penyajian data : alur kedua dari kegiatan analisis ini adalah penyajian data. Suatu "penyajian" dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan/verifikasi : kegiatan analisis yang terpenting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang terbagi menjadi:

Bab I Pendahuluan

Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas objek penelitian yang menjelaskan gambaran umum Kecamatan Indralaya Selatan, sejarah singkat Desa Tanjung Dayang Selatan, dan Desa Beti, Lokasi dan batas wilayah desa, keadaan geografi dan topografi desa, jumlah dan potensi penduduk, dan pemerintahan di desa tersebut.

Bab III Analisis Dan Interpretasi Data

Bab ini berisikan uraian secara lengkap pembahasan permasalahan yang ada, yaitu mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dan kendala-kendala yang dihadapinya.

Bab IV Penutup

Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang diperoleh dari temuan-temuan penelitian.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN: Balai Pustaka.
- Richard, M. Steers. 1996. *Efektivitas organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Sahdan, Goris, Iswari Paramita, dan Amaroni Sunaji. 2006. *ADD Untuk Kesejahteraan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Siagaan, Sondang P. 2002. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri, Effendi, dan Sofyan. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3s.
- Sudarto. 2011. "Peranan Kelembagaan Desa Dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 (Studi Penelitian di Desa Semangus Baru dan Semangus Lama Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas)". *Skripsi S1*. FISIP Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tiar Azhari. 2007. "Efektivitas Pengelolaan Sampah Pasar Km 5 Oleh Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Palembang Tahun 2007". *Skripsi S1*. FISIP Universitas Sriwijaya Indralaya.

Undang undang dan peraturan

- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa Perimbangan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan D.esa
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.